

Fungsi ekonomi kota kecamatan dalam pembangunan wilayah: Studi kasus Kabupaten Sukoharjo

Bayu Nurhadi^{1,*}

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga, Indonesia

^{*}) Korespondensi (e-mail: by.nurhadi@gmail.com)

Abstract

The sub-district has complete government and vertical agency apparatus as the lowest administrative unit. It has access to the bottom, which is very suitable to be developed as a service center and a center for developing rural areas. Thus the development and economic growth of the region are influenced by the function of the sub-district city. The problems faced in development in Sukoharjo district include the availability of socio-economic facilities and infrastructure at the sub-district level, The function of the sub-district city in regional economic development, and the system and the role of markets in the development of the selected sub-district area. Qualitative analysis was used to analyze the profile and role of the market in the economic development of the sub-district area, the role of the market, and the service area of the sample market. Meanwhile, quantitative analysis was conducted to analyze the relationship between regional resources and the availability of socio-economic facilities. Based on the scalogram analysis, parallel overlap analysis, Linkert scale, and also the Spearman correlation test, it can be concluded that there is a relationship between resource potential and the availability of socio-economic facilities, and there is also a reciprocal relationship between accessibility and the economy as well as a reciprocal relationship between the magnitude of market activity and community economic activities in the sub-region

Keywords: *Regional development, Regional resource potential, Market systems and roles*

Abstrak

Kecamatan sebagai unit administrasi terendah mempunyai aparat pemerintahan dan aparat instansi vertikal yang lengkap, selain itu memiliki akses ke bawah yang sangat sesuai untuk dikembangkan sebagai pusat pelayanan dan pusat pengembangan wilayah pedesaan. Dengan demikian perkembangan dan pertumbuhan ekonomi wilayah dipengaruhi oleh fungsi kota kecamatan. Masalah yang dihadapi dalam pembangunan di kabupaten Sukoharjo, antara lain: Ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi pada tingkat kecamatan; Fungsi kota kecamatan dalam pembangunan ekonomi wilayah; dan Sistem dan peran pasar dalam pembangunan wilayah kecamatan terpilih. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis profil dan peranan pasar dalam pembangunan ekonomi wilayah kecamatan, peran pasar, serta luas layanan dari pasar sampel. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan untuk menganalisis hubungan antar sumberdaya wilayah dengan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi. Berdasarkan analisis skalogram, analisis limpitan sejajar, skala Linkert, dan juga uji korelasi spearman dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara potensi sumberdaya dan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi dan juga terdapat hubungan timbal balik antara aksesibilitas dan ekonomi begitu juga terdapat hubungan timbal balik antara besarnya aktifitas pasar dengan aktifitas perekonomian masyarakat di sub wilayah

Kata kunci: Pembangunan wilayah, Potensi sumberdaya daerah, Sistem dan peran pasar

How to cite: Nurhadi, B. (2021). Fungsi ekonomi kota kecamatan dalam pembangunan wilayah: Studi kasus Kabupaten Sukoharjo. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 1(3), 142-159. <https://doi.org/10.53088/jerps.v1i3.313>

1. Pendahuluan

Daerah merupakan wilayah menurut batasan ruang lingkup kewenangan administrasi daerah. Sedangkan pengertian ruang adalah wujud wilayah baik dalam dimensi fisik geografis sebagai wadah kegiatan manusia atau yang bersifat alamiah maupun dalam dimensi ekonomi yang dicerminkan oleh hubungan elemen-elemen ekonomi (Soegijoko & Kusbiantoro, 1997). Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2015). Salah satu strategi yang ditempuh pemerintah adalah dengan melakukan devolusi yang dimanifestasikan menjadi otonomi. Pada umumnya otonomi adalah sebagai pemberian hak dan otoritas (kewenangan) kepada daerah untuk memutuskan sendiri setiap hal sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerahnya (Endang Larasati, 2010). Salah satu faktor eksternal yang akan mempengaruhi perkembangan suatu kota adalah keterkaitannya dengan kota lain, baik dalam maupun luar negeri, serta keterkaitan dengan hinterland atau daerah pedesaan sekitarnya (Lestari & Rijanta, 2018)

Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Dimana Kabupaten Sukoharjo merupakan wilayah yang bergerak dan menyokong Jawa Tengah di bidang pertanian. Komoditi pertanian yang mampu menyokong Jawa Tengah dan dapat berkembang dengan sangat bagus adalah padi, sehingga tidak heran bahwa Kabupaten Sukoharjo merupakan lumbung padinya Jawa Tengah. Selain sektor pertanian yang menjadi unggulan, terdapat juga sektor industri terutama industri kecil dan UKM mampu bersaing dan berkembang, bahkan industri besar pun mampu berdiri dan berkembang di Kabupaten Sukoharjo.

Perencanaan pembangunan harus memperhatikan pendekatan pusat-belakang (*center-pheriphery*), mempertimbangkan hubungan ekonomi antar kota sebagai pusat dan wilayah sekitarnya sebagai wilayah belakang (*pheriphery*). Hubungan antara pusat dan wilayah belakangnya ini dapat berbentuk arus barang, jasa, arus orang (migrasi), arus kapital dan arus informasi dari wilayah belakang ke pusat atau sebaliknya. Intensitas hubungan antara pusat dan *pheriphery* tergantung pada berbagai faktor antara lain jarak. Jarak dalam hal ini dapat dinyatakan dalam satuan panjang (km), waktu tempuh, biaya untuk mencapainya atau kemudahan untuk mencapainya (Glasson & Marshall, 2007).

Perencanaan pembangunan seharusnya mempertimbangkan hubungan saling menguntungkan antara pembangunan di berbagai tingkat administrasi, nasional, regional maupun lokal, hubungan antara pembangunan diberbagai sektor, dan keterkaitan antar aspek sosial, ekonomi dan fisik dalam proses pembangunan (Fitria Dianawati, 2004). perencanaan, sehingga potensi sumber daya yang ada akan dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Kebijakan pembangunan wilayah merupakan keputusan atau tindakan oleh pejabat pemerintah berwenang atau pengambil

keputusan publik guna mewujudkan suatu kondisi pembangunan. Sasaran akhir dari kebijakan pembangunan tersebut adalah untuk dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh sesuai dengan keinginan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat (puti Andiny, 2020).

Sejak berlakunya UU No 22 tahun 1999 dan UU No 25 tahun 1999 (yang sekarang UU No 32 tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004) serta Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2000, maka pembangunan tidak lagi dikendalikan dan diatur oleh pemerintah pusat secara ketat lagi, melainkan proses pembangunan sudah diserahkan kepada daerah kabupaten/kota seluas-luasnya berdasarkan otonomi daerah. Dengan adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat mengambil penuh setiap kebijakan yang akan diambil dalam rangka untuk mengembangkan wilayahnya. Pada dasarnya pengembangan pusat kegiatan untuk mempercepat pola tata kawasan suatu daerah dan pola interaksi antar daerah serta memperkuat mekanisme yang sudah ada dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya sesuai daerah masing-masing (Diartho & Pratama, 2018).

Pada realita yang terjadi sekarang berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut camat dan kelembagaan kecamatan justru memperoleh ruang gerak yang semakin terbatas dalam melakukan perannya. Saat ini camat dan lembaga kecamatan dengan statusnya sebagai Perangkat Daerah/PD atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lebih merupakan “perpanjangan tangan” bupati dan kabupaten, dimana semua kendali aktivitas pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan berada di bawah kendali bupati. Pergeseran status dan kedudukan camat dari “PW” menjadi “PD” sangat jelas telah mengurangi bahkan menghilangkan sebagian besar otoritas camat. Sedangkan saat ini otoritas camat berkisar pada fungsi-fungsi pelayanan yang sangat terbatas bahkan hanya menjalankan fungsi pelayanan yang lebih banyak bersifat surat rekomendasi atau surat pengantar atau surat keterangan bagi lembaga di atasnya yaitu bupati (pemerintah kabupaten).

Suatu kota akan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan aktivitas sosial budaya, ekonomi, dan politik yang melatarbelakanginya. Perkembangan tersebut ditunjukkan dengan adanya perubahan yang terjadi terus-menerus sebagai fenomena tersendiri yang tidak bisa dihentikan (Prasetyo & Pigawati, 2013). Fungsi kota-kota kecamatan sebagai pusat pengembangan dengan demikian adalah menyediakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang dibutuhkan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan (Arry Herlina, 1998). Efektifitas fungsi fasilitas sosial ekonomi dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas fasilitas pelayanan serta penyebarannya secara geografis (Fitria Dianawati, 2004).

Peranan kota kecamatan tergantung pada letak dan posisinya terhadap desa-desa di sekitarnya. Pada taraf pertama, kota kecamatan mendorong perkembangan desa melalui permintaan akan pangan dan penawaran akan fasilitas yang dimilikinya. Arus yang terjadi lebih banyak pada gerak sentripetal dimana penduduk desa pergi ke kota untuk melakukan transaksi. Pada tahap kedua, kota kecamatan akan mendorong

perkembangan desa sekitarnya yaitu dengan menumbuhkan kegiatan ekonomi baru, misalnya pengolahan hasil pertanian, yang akan meningkatkan pendapatan desa sekitarnya. Gerak balik ini bersifat sentrifugal dan merupakan perembesan ke wilayah pinggiran. Kota kecamatan juga berfungsi menghantarkan perkembangan kota lebih besar dan lebih tinggi hirarkinya ke daerah-daerah sekitarnya.

Permasalahan yang dihadapi dalam memanfaatkan sumberdaya yang paling pokok adalah ketidakmerataan dalam penyebarannya dan mobilitas yang tidak sempurna, sehingga menyebabkan perbedaan potensi antar wilayah. Ketidakmerataan pertumbuhan wilayah ini diperkuat dengan kegiatan investasi yang cenderung terpusat pada wilayah yang memiliki potensi yang tinggi ataupun di kawasan pusat pertumbuhan saja.

Perbedaan kondisi sumberdaya alam atau potensi fisik wilayah selain dapat menimbulkan ketimpangan antar wilayah, juga dapat menimbulkan ketimpangan antar sektor. Ketimpangan antar wilayah akan menyebabkan adanya wilayah maju, wilayah sedang, dan wilayah miskin. Sedang ketimpangan antar sektor dapat menyebabkan dominasi sektor-sektor tertentu dalam perekonomian wilayah dapat menimbulkan wilayah-wilayah maju, berkembang, dan kurang berkembang.

Kecamatan ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan kecil, dengan mempertimbangkan bahwa pemerintahan di tingkat kecamatan yang paling dekat dengan masyarakat dan merupakan unit wilayah yang cukup luas untuk satu unit pengembangan. Disamping itu adanya jumlah penduduk yang cukup untuk mendukung penyediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi. Penentuan lokasi fasilitas pelayanan yang tepat, diharapkan akan meningkatkan efektifitas fasilitas sosial ekonomi agar seluruh masyarakat mampu memanfaatkan fasilitas yang ada, sehingga mendorong pertumbuhan wilayah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis profil dan peranan pasar dalam pembangunan ekonomi di wilayah kecamatan, peranan pasar dan hari-hari pasaran, serta luas layanan dari pasar kecamatan sampel. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan untuk menganalisis hubungan antara sumberdaya wilayah yang tersedia dengan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi (fasilitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya).

Sebelum menganalisis hubungan antara potensi sumberdaya wilayah dengan fasilitas sosial ekonomi adalah dengan menganalisis sistem limpit sejajar untuk menetapkan wilayah-wilayah pembangunan yang perlu mendapat prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah. Dengan menggunakan sistem limpitan sejajar dan skala Likert maka akan didapat tiga kategori wilayah, yaitu: berkembang, sedang dan terbelakang.

Pengkategorian wilayah ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu mengetahui peringkat dari skor potensi sumberdaya wilayah melalui analisis hirarki potensi

sumberdaya wilayah, yang dipadukan dengan analisis hirarki ketersediaan fasilitas sosial ekonomi.

$$\text{Skala Likert} = \frac{\text{Skor Maksimal} - \text{Skor Minimal}}{\text{Jumlah Kategori}} - 1$$

Untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel yang dianalisis, dilaksanakan dengan menghitung koefisien korelasi antara hirarki potensi fisik wilayah (X) dengan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi, aksesibilitas dan kepadatan penduduk (Y), melalui metode korelasi peringkat Spearman (*Spearman's Rank Correlation*).

Notasi matematis dari uji korelasi peringkat spearman dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Dimana:

- r_s : nilai koefisien korelasi
- d_i : selisih peringkat bagi x dan y
- n: jumlah sampel/data

Nilai r_s dapat terjadi dari -1 sampai +1. nilai +1 atau -1 menunjukkan adanya hubungan yang sempurna antara X dan Y, tanda plus artinya pemberian peringkat itu sejalan, sedangkan tanda minus berarti bertolak belakang. Bila r_s dekat dengan nol, kedua peubah tidak berkorelasi. Hasil uji korelasi peringkat Spearman dilihat dari tingkat keeratan hubungan antar variable

Tabel 1. Kategorisasi tingkat keeratan hubungan

| r_s | Kategori |
|----------------------|-------------|
| $0 \leq r_s < 0.2$ | Tidak erat |
| $0.2 \leq r_s < 0.5$ | Cukup erat |
| $0.5 \leq r_s < 0.8$ | Erat |
| $r_s \geq 0.8$ | Sangat erat |

Sumber: (Walpole, 1982)

Alat yang digunakan untuk menganalisis fungsi ekonomi kota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan kecil pedesaan adalah metode skalogram. Metode tersebut digunakan untuk mengetahui hirarki atau peringkat dari pusat pengembangan dan sarana pembangunan. Metode skalogram dapat memberikan informasi tentang hirarki pusat-pusat pengembangan dan penyebaran fasilitas pelayanan sosial ekonomi.

Jenis fasilitas yang digunakan adalah sarana dan prasarana pelayanan kesehatan meliputi rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, dokter/bidan. Sedangkan pelayanan pendidikan meliputi SD, SMP, SMA, akademi/PT (Perguruan Tinggi). Fasilitas keagamaan meliputi masjid, gereja, vihara/pura. Sarana transportasi meliputi jumlah kendaraan bermotor. fasilitas ekonomi yang digunakan meliputi pasar, bank, swalayan dan lain-lainnya seperti bioskop, wartel dan kantor pos. keterbatasan dari skor skalogram adalah hanya memperhitungkan kuantitas nya saja bukan kualitas dari fasilitas yang dianalisis.

Analisis profil pasar dan fungsi pasar dalam pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan menelaah kegiatan pasar, penyebaran lokasi pasar dalam tata ruang wilayah kecamatan sampel. Terdapat hubungan yang nyata antara variabel perekonomian dengan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi, aksesibilitas dan kepadatan penduduk (Sumedi, 1997).

3. Hasil dan Pembahasan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo, telah ditetapkan enam SWP (Badan Perencanaan Daerah Sukoharjo, 2018), yaitu:

1. Sub Wilayah Pembangunan I
Meliputi wilayah Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Gatak dengan pusat pengembangan di Kecamatan Kartasura. Prioritas pengembangan SWP I adalah untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, industri, perdagangan, perhubungan, pemukiman/perumahan, dan pariwisata.
2. Sub Wilayah Pembangunan II
Meliputi wilayah Kecamatan Grogol dan Kecamatan Baki dengan pusat pengembangan di Kecamatan Grogol. Prioritas pengembangan SWP II adalah untuk pengembangan fungsi pertanian, tanaman pangan, industri, perdagangan, pemukiman/perumahan, dan pariwisata.
3. Sub Wilayah Pembangunan III
Meliputi wilayah Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Polokarto dan Kecamatan Bendosari bagian utara, selatan, timur dengan pusat pengembangan di Kota Mojolaban. Prioritas pengembangan SWP III adalah untuk pengembangan fungsi pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan, peternakan, industri, perdagangan, perhubungan, pemukiman/perumahan, dan pariwisata.
4. Sub Wilayah Pembangunan IV
Meliputi wilayah Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Bendosari bagian barat dengan pusat pengembangan di Kota Sukoharjo. Prioritas pengembangan SWP IV adalah untuk pengembangan fungsi pertanian tanaman pangan, perikanan, perdagangan, pemerintahan, pemukiman/perumahan dan pariwisata, industri, pariwisata dan pendidikan.
5. Sub Wilayah Pembangunan V
Meliputi Kecamatan Nguter dengan pusat pengembangan di Kota Nguter. Prioritas pengembangan SWP V adalah untuk pengembangan fungsi industri, pertanian tanaman pangan, peternakan dan perdagangan.
6. Sub Wilayah Pembangunan VI
Meliputi Kecamatan Tawang Sari, Kecamatan Bulu dan Kecamatan Weru dengan pusat pengembangan di Kota Tawang Sari. Prioritas pengembangan SWP VI adalah untuk pengembangan fungsi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, perdagangan, perhubungan, pertambangan/bahan galian, industri kecil dan pariwisata.

Rencana pengembangan kawasan prioritas Kabupaten Sukoharjo di setiap kecamatan meliputi (Badan Perencanaan Daerah Sukoharjo, 2018):

1. Kecamatan Sukoharjo sebagai kawasan:
 - a. Pusat perdagangan (Trade Center) yang lebih berorientasi pada penjualan hasil-hasil kerajinan
 - b. Kota transit
 - c. Pusat pendidikan
 - d. Pengembangan kawasan agropolitan dan perikanan
2. Kecamatan Kartasura sebagai kawasan:
 - a. Pusat perdagangan grosir dan tekstil
 - b. Pusat pendidikan
 - c. Pusat pelayanan kesehatan
 - d. Pariwisata
 - e. Pengembangan kawasan agropolitan
3. Kecamatan Grogol sebagai kawasan:
 - a. Pusat pemukiman modern
 - b. Daerah perdagangan modern (produk-produk elektronik, telekomunikasi dll)
 - c. Pengembangan pendidikan
 - d. Pariwisata
 - e. Pengembangan kawasan agropolitan dan perikanan
4. Kecamatan Gatak sebagai kawasan;
 - a. Pengembangan pertanian tanaman pangan
 - b. Industri kecil dan menengah (mebel rotan)
5. Kecamatan Baki sebagai kawasan:
 - a. Pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
 - b. Kawasan pemukiman
 - c. Pengembangan industri kecil (gitar)
6. Kecamatan Mojolaban sebagai kawasan:
 - a. Pengembangan industri kecil (genteng, ethanol dan gamelan)
 - b. Pengembangan pertanian tanaman pangan (padi), hortikultura, perikanan dan peternakan
7. Kecamatan Polokarto sebagai kawasan:
 - a. Pengembangan tanaman lada
 - b. Pengembangan tanaman melon
 - c. Pengembangan industri kecil (ethanol)
8. Kecamatan Weru sebagai kawasan:
 - a. Konservasi alam dan lingkungan hidup
 - b. Pengembangan hutan jati dan mahoni
 - c. Pengembangan tanaman palawija
9. Kecamatan Bulu sebagai kawasan:
 - a. Konservasi alam dan lingkungan hidup
 - b. Pengembangan hutan jati dan mahoni
 - c. Pengembangan tanaman perkebunan dan palawija

10. Kecamatan Tawang Sari sebagai kawasan:
 - a. Pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan
 - b. Transit area bagi industri kecil
11. Kecamatan Bendosari sebagai kawasan:
 - a. Pengembangan tanaman palawija
 - b. Pengembangan perikanan dan peternakan
 - c. Pengembangan tanaman lada
 - d. Pariwisata
12. Kecamatan Nguter sebagai kawasan:
 - a. Pengembangan kawasan industri jamu
 - b. Pengembangan tanaman melon
 - c. Pengembangan tanaman lada
 - d. Pariwisata

Analisis hirarki potensi sumberdaya wilayah menggunakan batasan wilayah unit program, dengan wilayah kecamatan sebagai satuan wilayah analisis. Kabupaten Sukoharjo terbagi atas 12 kecamatan. Berdasarkan hasil analisis hirarki potensi sumberdaya wilayah, maka kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sukoharjo dapat digolongkan ke dalam kecamatan kaya, sedang dan miskin. Dengan demikian terlihat perbedaan potensi sumberdaya wilayah sehingga dapat disusun kerangka kebijaksanaan pembangunan di masing-masing wilayah.

Komponen yang digunakan sebagai dasar analisis hirarki potensi sumberdaya wilayah meliputi sektor pertanian, sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertambangan dan energy, kependudukan dan sektor jasa. Komponen dari sektor pertanian meliputi sub sektor tanaman pangan (padi, jagung, ubi, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau) yang terdiri dari luas lahan yang potensial untuk dikembangkan menjadi lahan produksi tanaman pangan dan produksi tanaman pangan. Sub sektor peternakan dibedakan menjadi ternak besar (kuda, sapi, kerbau, kuda) dan ternak kecil (kambing, ayam, domba, itik). Sub sektor perkebunan meliputi perkebunan rakyat dan perkebunan besar, sedangkan sub sektor perikanan meliputi perikanan kolam dan perikanan keramba.

Komponen sektor industri meliputi jumlah unit usaha pada industri kecil, industri rumah tangga dan aneka industri. Sektor pertambangan dan energi, sektor perdagangan dan sektor jasa diukur dari sumbangannya terhadap produksi domestik Kabupaten Sukoharjo, yang menunjukkan tingkat pengelolaan saat ini dan potensi pengembangan di masa yang akan datang.

Angka yang tertera pada setiap sumberdaya berasal dari besarnya jumlah sumberdaya yang diperingkatkan. Dimana jumlah terbesar diberikan peringkat pertama, dan seterusnya.

Tabel 2. Analisis Potensi Sumberdaya Wilayah Kabupaten Sukoharjo

| Kecamatan | Pend. Usia Kerja | Tanaman Pangan | Tanaman Sayur | Tanaman Buah | Temak Besar | Temak Kecil | Perkebunan Rakyat | Perkebunan Besar | Perikanan | Irigasi | Industri | Pertambangan energi | Perdagangan | Jasa | Total | Deskripsi |
|-------------|------------------|----------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-----------|---------|----------|---------------------|-------------|------|-------|-----------|
| Weru | 6 | 4 | 12 | 11 | 3 | 7 | 2 | 6 | 12 | 7 | 10,0 | 1 | 10,0 | 8 | 99 | Sedang |
| Bulu | 10 | 7 | 10 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 11 | 11 | 9,0 | 2 | 8,5 | 12 | 101,5 | Sedang |
| Tawang Sari | 9 | 6 | 11 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6,0 | 5 | 6,0 | 6 | 88 | Sedang |
| Sukoharjo | 3 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 12 | 7 | 1 | 1 | 3,0 | 11 | 3,0 | 3 | 73 | Kaya |
| Nguter | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | 12 | 2 | 7 | 4 | 7,0 | 8 | 7,0 | 7 | 88 | Sedang |
| Bendosari | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 12 | 3 | 2 | 5 | 11,5 | 7 | 11,5 | 10 | 86 | Kaya |
| Polokarto | 5 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 5,0 | 6 | 5,0 | 5 | 64 | Kaya |
| Mojolaban | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 11 | 12 | 9 | 10 | 3 | 4,0 | 9 | 4,0 | 4 | 83 | Kaya |
| Grogol | 1 | 11 | 3 | 6 | 10 | 4 | 12 | 8 | 4 | 10 | 1,0 | 12 | 1,0 | 2 | 85 | Kaya |
| Baki | 11 | 9 | 7 | 7 | 11 | 5 | 12 | 12 | 5 | 8 | 8,0 | 4 | 8,5 | 9 | 116,5 | Miskin |
| Gatak | 12 | 10 | 4 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11,5 | 3 | 11,5 | 11 | 138 | Miskin |
| Kartasura | 2 | 12 | 9 | 12 | 9 | 6 | 12 | 12 | 8 | 12 | 2,0 | 10 | 2,0 | 1 | 109 | Sedang |

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo, diolah

Catatan: Penduduk usia kerja di Indonesia menurut Dumairy adalah penduduk yang berumur minimum 10 tahun, tanpa batas umur maksimum (Dumairy, 1994)

Keterangan: a. kategori kaya dengan skor: 64 – 87.67

b. kategori sedang dengan skor 87.68 – 111.36

c. kategori miskin dengan skor 111.36 ke atas

Pengkategorian wilayah di Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Skala Likert adalah

$$\begin{aligned} \text{Range} &= \frac{\text{Skor maksimal} - \text{skor minimal}}{\text{jumlah kategori}} - 1 \\ &= \frac{138 - 64}{3} - 1 \\ &= 23.67 \end{aligned}$$

Dengan memasukkan nilai skor maksimal 138, skor minimal 64 dan jumlah kategori yang diinginkan adalah 3, maka didapatkan nilai range sebesar 23.67, sehingga kisaran skor untuk pengkategorian wilayah adalah (i) kategori kaya skor 64 - 87.67, (ii) kategori sedang skor 87.68 – 111.35, (iii) kategori miskin skor 111.36 ke atas.

Analisis hirarki ketersediaan fasilitas sosial ekonomi menunjukkan tingkat ketersediaan dan penyebaran fasilitas sosial ekonomi pada wilayah-wilayah. Hirarki fasilitas sosial ekonomi didasarkan pada ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi. Secara garis besar dapat dibedakan ke dalam fasilitas ekonomi, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, sarana informasi, pemerintahan, fasilitas peribadatan dan sarana pelayanan umum.

Pertumbuhan ekonomi wilayah sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas wilayah ke kota. Aksesibilitas terhadap kota ditunjukkan dengan tersedianya fasilitas jalan, fasilitas transportasi yang menghubungkan wilayah yang pertumbuhannya tinggi. Hal ini dapat diamati dari hasil analisis bahwa kecamatan-kecamatan yang maju terletak di sepanjang jalur lalu lintas utama Kecamatan Kartasura, Grogol dan Sukoharjo yang terletak disepanjang jalur utama Kartasura-Sukoharjo. Disamping ketersediaan

fasilitas transportasi, hal yang menentukan adalah ketersediaan potensi sumberdaya alam. Kecamatan-kecamatan yang menduduki peringkat atas memiliki sumberdaya alam yang besar atau yang termasuk kategori kecamatan kaya dalam analisis potensi sumberdaya alam wilayah.

Kecamatan-kecamatan yang mempunyai fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi yang lengkap juga memiliki jumlah penduduk yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas sosial ekonomi cenderung terpusat pada wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang besar atau penempatan pemukiman penduduk di lokasi yang strategis. Angka yang tertera pada setiap fasilitas berasal dari besarnya jumlah fasilitas yang diperingkatkan. Dimana jumlah terbesar diberikan peringkat pertama, dan seterusnya.

Tabel 3. Analisis Ketersediaan dan Penyebaran Fasilitas Sosial Ekonomi Kabupaten Sukoharjo

| Kecamatan | Ekonomi | Transportasi | Fasilitas umum | Kesehatan | Pendidikan | Fasilitas ibadah | Pemerintahan | Telekomunikasi | Total | Deskripsi |
|------------|---------|--------------|----------------|-----------|------------|------------------|--------------|----------------|-------|-------------|
| Weru | 9 | 11 | 5 | 7,5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 47,5 | Sedang |
| Bulu | 12 | 12 | 12 | 10,5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 93,5 | Terbelakang |
| Tawangsari | 8 | 9 | 3 | 5,5 | 8 | 10 | 10 | 6 | 59,5 | Sedang |
| Sukoharjo | 2 | 2 | 2 | 3,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 18 | Maju |
| Nguter | 7 | 5 | 8 | 7,5 | 9 | 8 | 7 | 9 | 60,5 | Sedang |
| Bendosari | 6 | 10 | 9 | 9,5 | 6 | 6 | 9 | 10,5 | 66 | Sedang |
| Polokarto | 5 | 8 | 6 | 5,5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 42,5 | Sedang |
| Mojolaban | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 35 | Maju |
| Grogol | 1 | 1 | 4 | 3,5 | 7 | 2,5 | 3 | 1 | 23 | Maju |
| Baki | 11 | 7 | 10 | 9,5 | 11 | 9 | 8 | 10,5 | 76 | Terbelakang |
| Gatak | 10 | 6 | 11 | 10,5 | 10 | 11 | 11 | 8 | 77,5 | Terbelakang |
| Kartasura | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 22 | Maju |

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo, diolah

Keterangan: a. kategori maju dengan skor 18 – 42.17

b. kategori sedang dengan skor 42.18 – 66.35

c. kategori terbelakang dengan skor 66.36 ke atas

Pengkategorian wilayah di Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Skala Likert adalah

$$\text{Range} = \frac{\text{Skor maksimal} - \text{skor minimal}}{\text{jumlah kategori}} - 1$$

$$= \frac{93.5 - 18}{3} - 1$$

$$= 24.17$$

Dengan menggunakan skala Likert, dimasukkan nilai skor maksimal 93.5, skor minimal 18 dan jumlah kategori yang diinginkan adalah 3, maka didapatkan nilai range sebesar 24.17, sehingga kisaran skor untuk pengkategorian wilayah adalah kategori maju (skor 18 - 42.17), kategori sedang (skor 42.18 – 66.35) dan kategori terbelakang

(skor 66.36 ke atas). Dilihat dari ketersediaan dan penyebaran fasilitas sosial ekonomi Kabupaten Sukoharjo, empat kecamatan (33.33 persen) termasuk dalam kategori maju, lima kecamatan (41.66 persen) termasuk kategori sedang dan tiga kecamatan (25.01 persen) termasuk kategori terbelakang. ketersediaan fasilitas sosial ekonomi yang baik, diharapkan akan menunjang aktifitas masyarakat dalam memanfaatkan dan menggali potensi sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup.

Untuk melihat pengkategorian antara potensi sumberdaya wilayah dengan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi dengan menggabungkan jumlah total keduanya, dengan menggunakan analisis limpitan sejajar.

Tabel 4. Analisis Limpitan Sejajar Kabupaten Sukoharjo

| Kecamatan | Potensi SD | Faso sek | Total | Deskripsi |
|-------------|------------|----------|-------|-------------|
| Weru | 99 | 47,5 | 146,5 | Sedang |
| Bulu | 101,5 | 93,5 | 195 | Terbelakang |
| Tawang Sari | 88 | 59,5 | 147,5 | Sedang |
| Sukoharjo | 73 | 18 | 91 | Berkembang |
| Nguter | 88 | 60,5 | 148,5 | Sedang |
| Bendosari | 86 | 66 | 152 | Sedang |
| Polokarto | 64 | 42,5 | 106,5 | Berkembang |
| Mojolaban | 83 | 35 | 118 | Berkembang |
| Grogol | 85 | 23 | 108 | Berkembang |
| Baki | 116,5 | 76 | 192,5 | Terbelakang |
| Gatak | 138 | 77,5 | 215,5 | Terbelakang |
| Kartasura | 109 | 22 | 131 | Berkembang |

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo, diolah

Keterangan: a. kategori berkembang dengan skor 91 – 131.5

b. kategori sedang dengan skor 131.6 – 172.1

c. kategori terbelakang dengan skor 172.2 ke atas

Pengkategorian wilayah di Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Skala Linkert adalah

$$\text{Range} = \frac{\text{Skor maksimal} - \text{skor minimal}}{\text{jumlah kategori}} - 1$$

$$= \frac{215.5 - 91}{3} - 1$$

$$= 40.5$$

Nilai skor maksimal 215.5, skor minimal 91 dan jumlah kategori yang diinginkan adalah 3, maka didapatkan nilai range sebesar 40.5, sehingga kisaran skor untuk pengkategorian wilayah adalah kategori berkembang (skor 91–131.5), kategori sedang (skor 131.6 – 172.1) dan kategori terbelakang (skor 172.2 ke atas). Dilihat dari analisis Limpitan Sejajar, lima kecamatan (41.66 persen) termasuk dalam kategori berkembang, empat kecamatan (33.33 persen) termasuk kategori berkembang dan tiga kecamatan (25.01 persen) termasuk kategori terbelakang.

Penyediaan fasilitas sosial ekonomi cenderung berkorelasi positif dengan potensi sumberdaya wilayah yang dimiliki. Untuk pembuktian, dilaksanakan uji korelasi peringkat Spearman.

Tabel 5. Uji Korelasi Peringkat Spearman Fasilitas Sosial Ekonomi dengan Potensi Sumberdaya Wilayah

| No | X | R(X _i) | Y | R(Y _i) | d _i | d _i ² |
|----------------------|-------|--------------------|------|--------------------|----------------|-----------------------------|
| 1 | 99,0 | 8,0 | 47,5 | 6,0 | 2,0 | 4,00 |
| 2 | 101,5 | 9,0 | 93,5 | 12,0 | -3,0 | 9,00 |
| 3 | 88,0 | 6,5 | 59,5 | 7,0 | -0,5 | 0,25 |
| 4 | 73,0 | 2,0 | 18,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 |
| 5 | 88,0 | 6,5 | 60,5 | 8,0 | -1,5 | 2,25 |
| 6 | 86,0 | 5,0 | 66,0 | 9,0 | -4,0 | 16,00 |
| 7 | 64,0 | 1,0 | 42,5 | 5,0 | -4,0 | 16,00 |
| 8 | 83,0 | 3,0 | 35,0 | 4,0 | -1,0 | 1,00 |
| 9 | 85,0 | 4,0 | 23,0 | 3,0 | 1,0 | 1,00 |
| 10 | 116,5 | 11,0 | 76,0 | 10,0 | 1,0 | 1,00 |
| 11 | 138,0 | 12,0 | 77,5 | 11,0 | 1,0 | 1,00 |
| 12 | 109,0 | 10,0 | 22,0 | 2,0 | 8,0 | 64,00 |
| $\sum d_i^2 = 116.5$ | | | | | | |

Dimana:

X = Potensi sumberdaya

R(X_i) = Peringkat potensi sumberdaya

Y = Ketersediaan dan penyebaran fasilitas sosial ekonomi

R(Y_i) = Peringkat ketersediaan dan penyebaran fasilitas sosial ekonomi

d_i = Selisih peringkat antara dua variabel R(X_i) - R(Y_i)

n = 12

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

$$r_s = 1 - \frac{6 (116.5)}{12(12^2 - 1)}$$

$$r_s = 1 - \frac{699}{1716}$$

$$r_s = 0.593$$

Hasil uji korelasi peringkat Spearman membuktikan bahwa ada hubungan antara potensi sumberdaya wilayah dengan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi di Kabupaten Sukoharjo. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi (r_s), yaitu 0.593 yang berarti keduanya berhubungan erat dan positif atau sejalan.

Dapat diambil kesimpulan bahwa untuk memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah yang tersedia, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dan tersedianya fasilitas sosial ekonomi yang baik. Jadi, akan terjadi pertumbuhan pesat yang disebabkan oleh aglomerasi aktifitas ekonomi dan pemusatan penyediaan fasilitas sosial ekonomi.

Penetapan pusat-pusat pengembangan berdasarkan indikator ketersediaan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan sosial ekonomi dapat ditelaah melalui analisis skalogram. Berdasarkan analisis dengan menggunakan tabel skalogram Kabupaten Sukoharjo terlihat bahwa pusat-pusat pengembangan akan tersusun dari hirarki tertinggi sampai terendah. Secara relatif pusat pengembangan kecamatan pada peringkat atas

mempunyai ketersediaan fasilitas pelayanan yang lebih baik bila dibandingkan dengan pusat pengembangan pada peringkat rendah.

Tabel 6. Hirarki Pusat-Pusat Pengembangan Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Metode Skalogram

| Pusat Pengembangan | Skor | Peringkat |
|--------------------|------|-----------|
| Kartasura | 3677 | 1 |
| Grogol | 2728 | 2 |
| Sukoharjo | 2537 | 3 |
| Mojolaban | 2034 | 4 |
| Polokarto | 1929 | 5 |
| Tawang Sari | 1908 | 6 |
| Nguter | 1720 | 7 |
| Weru | 1655 | 8 |
| Baki | 1592 | 9 |
| Bendosari | 1389 | 10 |
| Gatak | 1313 | 11 |
| Bulu | 1070 | 12 |

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo, data diolah

Kecamatan peringkat atas adalah kecamatan-kecamatan yang mempunyai kedudukan sebagai pusat pengembangan utama bagi *hinterland* yang menjadi pengaruhnya. Kecamatan Kartasura menjadi pusat pengembangan dalam SWP I. Sedangkan Kecamatan Grogol menjadi pusat pengembangan untuk SWP II yang meliputi wilayah Kecamatan Baki. Pada peringkat bawah Kecamatan Weru, Baki, Bendosari dan Bulu menjadi *hinterland* untuk kecamatan lain yang menjadi pusat pertumbuhan. Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, Nguter dan Tawang Sari terletak pada SWP III, IV, V dan VI, dan ke empat kecamatan tersebut sebagai pusat pengembangan.

Kecamatan-kecamatan pada peringkat atas cenderung mempunyai jenis prasarana yang lebih banyak. Hal ini berarti bahwa pusat-pusat tersebut mempunyai fasilitas pelayanan yang lebih lengkap dibandingkan dengan pusat-pusat yang berperingkat menengah atau rendah. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi.

Fungsi ekonomi kota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan kecil pedesaan dalam pembangunan wilayah memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai pusat aktifitas ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan, sebagai pusat lokasi pemukiman penduduk, dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mengimbaskan pembangunan *hinterland* dan menjadi perantara pertumbuhan kota besar ke pedesaan.

Konsentrasi aktifitas ekonomi ditunjukkan dengan analisis ekonomi. Pada ketiga kota kecamatan contoh menunjukkan peringkat pertama. Konsentrasi kegiatan ekonomi juga ditunjukkan oleh keragaman aktifitas ekonomi masyarakat. Pada ketiga kota kecamatan ini terdapat ragam aktifitas ekonomi yang paling tinggi. Pada kota kecamatan, berkembang sektor sekunder yang meliputi industri pengolahan terutama

skala rumahtangga, dan sektor tersier yaitu sektor jasa yang meliputi jasa transportasi, komunikasi, keuangan dan rumah makan

Tabel 7. Kepadatan Penduduk, Peringkat Skalogram dan Aktifitas Ekonomi pada Tiga Kota Kecamatan

| No | Kota | Kepadatan Penduduk | Peringkat Skalogram | Peringkat Perekonomian |
|----|-----------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | Sukoharjo | 9139 | 1 | 1 |
| 2 | Kateguhan | 5236 | 1 | 1 |
| 3 | Bulu | 4095 | 1 | 1 |

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo, data diolah

Penyebaran fasilitas sosial ekonomi juga terkonsentrasi pada kota kecamatan, baik pada Kecamatan Sukoharjo, Tawang Sari dan Bulu. Konsentrasi penyebaran fasilitas sosial ekonomi ini ditunjukkan melalui analisis skalogram, dimana kota-kota kecamatan menduduki peringkat pertama baik dalam jumlah jenis maupun jumlah unit fasilitas sosial ekonomi yang tersedia. Terkonsentrasinya fasilitas sosial ekonomi menambah efektivitas fasilitas tersebut karena melayani jumlah penduduk yang besar sehingga ambang batas penduduk terlampaui.

Tabel 8. Koefisien Korelasi Rank Spearman Kecamatan Sukoharjo, Tawang Sari dan Bulu

| Korelasi | Kecamatan | | |
|-----------------------------|-----------|-------------|-------|
| | Sukoharjo | Tawang Sari | Bulu |
| Kepadatan dan Ekonomi | 0,767 | 0,788 | 0,608 |
| Kepadatan dan Fasilitas | 0,795 | 0,762 | 0,608 |
| Ekonomi dan Fasilitas | 0,999 | 0,942 | 0,996 |
| Aksesibilitas dan Kepadatan | 0,732 | 0,399 | 0,273 |
| Aksesibilitas dan Ekonomi | 0,596 | 0,593 | 0,266 |
| Aksesibilitas dan Fasilitas | 0,579 | 0,601 | 0,241 |

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo, data diolah

Koefisien hubungan antara kepadatan penduduk, perekonomian, fasilitas dan aksesibilitas. Kecamatan Sukoharjo sebagai kecamatan maju yang mempunyai koefisien lebih besar dibandingkan dengan kecamatan contoh lainnya. Itu berarti bahwa dengan adanya aksesibilitas yang tinggi akan mengimbas pada kepadatan penduduk, perekonomian masyarakat dan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi.

Nilai koefisien menunjukkan hubungan yang positif. Hal ini karena perkembangan aktifitas ekonomi memerlukan tersedianya fasilitas pendukung yang baik. Pemukiman masyarakat akan membentuk pola yang optimal dari pusat fasilitas sosial ekonomi dan pusat aktifitas perekonomian masyarakat.

Jarak efektif lokasi pemukiman terhadap pusat fasilitas lebih dipengaruhi oleh kemudahan mencapainya daripada jarak geografisnya. Kemudahan untuk mencapai lokasi ditentukan oleh tersedianya fasilitas transportasi dan fasilitas komunikasi di suatu wilayah pemukiman. Fasilitas transportasi meliputi tersedianya jalan yang menghubungkan wilayah tersebut ke wilayah lainnya dan tersedianya sarana transportasi. Hasil analisis menunjukkan pengaruh yang nyata antara aksesibilitas

dengan perekonomian, ketersediaan fasilitas sosial ekonomi maupun dengan kepadatan penduduk pada ketiga kecamatan yang dianalisis.

Aktifitas pasar pada ketiga kecamatan sampel dilakukan dengan membandingkan variabel-variabel dalam kegiatan pasar, baik variabel langsung maupun variabel tidak langsung. Variabel langsung meliputi luas areal pasar, jumlah kios dan jumlah los dan jumlah pedagang. Sedangkan variabel tidak langsung meliputi jumlah retribusi dan pendapatan pasar.

Tabel 9. Perbandingan Aktifitas Pasar Kecamatan pada Kecamatan Sampel

| No. | Nama Pasar | Luas (m ²) | Jumlah Kios | Jumlah Los | Jumlah Pedagang |
|-----|-------------|------------------------|-------------|------------|-----------------|
| 1 | Sukoharjo | 2 746 | 221 | 29 | 300 |
| 2 | Tawang Sari | 1 069 | 84 | 50 | 184 |
| 3 | Bulu | 453 | 40 | 10 | 31 |

Sumber: (Badan Perencanaan Daerah Sukoharjo, 2018)

Aktifitas pasar terbesar terjadi pada pasar Sukoharjo, kemudian selanjutnya pasar Tawang Sari dan lalu pasar Bulu. Jumlah kios di pasar Sukoharjo mencapai 221 buah dan diantara ketiga pasar kecamatan di kecamatan contoh merupakan kios paling banyak, namun sebaliknya jumlah los paling banyak pada pasar Tawang Sari yaitu 50 buah. Sedangkan jumlah kios dan los di pasar Bulu berada diantaranya yaitu 40 buah dan 10 buah. Jumlah pedagang juga paling banyak di pasar Sukoharjo yang mencapai 300 orang, sedangkan di pasar Tawang Sari mencapai 184 pedagang dan di pasar Bulu mencapai 31 orang.

Tabel 10. Karakteristik Pedagang pada Pasar Kecamatan Sampel Kabupaten Sukoharjo

| Variabel | Jumlah Pedagang | Persentase |
|--------------------------------------|-----------------|------------|
| Umur: | | |
| < 30 tahun | 8 | 14,29 |
| 30 – 40 tahun | 18 | 32,14 |
| 41 – 50 tahun | 10 | 17,86 |
| > 50 tahun | 20 | 35,71 |
| Total | 56 | 100,00 |
| Lama Berdagang: | | |
| < 10 tahun | 8 | 14,29 |
| 10 – 20 tahun | 43 | 76,76 |
| > 20 tahun | 5 | 8,93 |
| Total | 56 | 100,00 |
| Jarak dari Rumah ke Pasar: | | |
| < 3 km | 27 | 48,21 |
| 3 – 5 km | 20 | 35,71 |
| > 5 km | 9 | 16,07 |
| Total | 56 | 100,00 |
| Alasan Berdagang di Pasar: | | |
| Ramai (banyak pembeli) | 18 | 32,14 |
| Dekat | 29 | 51,79 |
| Sudah punya kios dari dulu (warisan) | 9 | 16,07 |
| Total | 56 | 100,00 |

Sumber: data primer

Aksesibilitas, ketersediaan fasilitas sosial ekonomi dan kepadatan penduduk ternyata berpengaruh terhadap perekonomian wilayah. Hal tersebut terbukti dari alasan pedagang yang memilih berdagang di pasar. Jarak merupakan penggambaran dari aksesibilitas, ramai (banyak pembelinya) yang merupakan penggambaran dari jumlah penduduk layanan dan juga kelengkapan suatu pasar (ketersediaan fasilitas).

Jumlah pedagang pada kecamatan sampel lebih banyak berumur lebih dari 50 tahun, yaitu sekitar 35.71 persen dari total keseluruhan responden pedagang. Sedangkan para pedagang sekitar 76.76 persen sudah berdagang sekitar 10 sampai 20 tahun, dan dilihat dari jarak tempat tinggal pedagang dengan pasar, sekitar 35.71 persen yang berjarak sekitar 3 sampai 5 km. jika dilihat dari usia pedagang itu sendiri lebih banyak yang berusia lebih dari 50 tahun dikarenakan alasan mereka berdagang. Banyak yang mengatakan alasannya karena sudah dari dulu berdagang di pasar tersebut sehingga kios atau los sudah menjadi hak milik dan juga dikarenakan karena di pasar tersebut merupakan pasar yang ramai, sedangkan untuk usia muda mereka lebih suka untuk bekerja pada sektor lain.

Jika dilihat dari jarak antara pasar dengan tempat tinggal pedagang, ternyata diatas 5 km masih ada yang mau berdagang di pasar pilihannya. Hal tersebut menggambarkan bahwa aksesibilitas dan fasilitas pasar menjadikan alasan seseorang pedagang untuk berdagang di suatu pasar walaupun jaraknya jauh.

Alasan pedagang untuk berdagang di pasar didominasi oleh keadaan pasar yang ramai atau banyak pembelinya. Hal tersebut dikarenakan daya tarik pasar yaitu kelengkapan pasar dan juga adanya aksesibilitas yang baik.

Tabel 11. Karakteristik Pembeli pada Pasar Kecamatan Sampel Kabupaten Sukoharjo

| Variabel | Jumlah Pedagang | Persentase |
|----------------------------------|-----------------|------------|
| Jarak antara rumah dengan pasar: | | |
| < 2 km | 21 | 37,5 |
| 2 – 3 km | 29 | 51,79 |
| 4 – 5 km | 4 | 7,14 |
| > 5 km | 2 | 3,57 |
| Total | 56 | 100,00 |
| Alasan berbelanja di pasar: | | |
| Dekat rumah | 32 | 57,14 |
| Lengkap | 19 | 33,93 |
| Berbelanja untuk dijual lagi | 5 | 8,99 |
| Total | 56 | 100,00 |

Sumber: data primer

Karakteristik pembeli sebagian besar tergantung pada lokasi dimana pasar tersebut berada. Persentase terbesar pembeli memilih berbelanja di pasar karena dekat dengan tempat tinggalnya, meskipun pendapatan mereka beragam. Disusul kelengkapan suatu pasar dengan kebutuhan mereka, yang mencapai 34.55 persen. ternyata dalam memilih tempat berbelanja, lokasi menjadi faktor yang utama yang didukung dengan adanya aksesibilitas yang lancar, dan selanjutnya kelengkapan itu

sendiri. Adanya pendapatan mereka yang beragam tidak begitu berpengaruh, karena di saat ingin berbelanja selain dari pasar yang mereka inginkan, mereka akan berbelanja barang-barang yang bukan dikonsumsi setiap hari. Jarak menjadi tidak begitu berpengaruh apabila aksesibilitas lancar dan barang-barang yang dijual di pasar lengkap. Kedua hal tersebut menjadi menarik untuk pembeli berbelanja di pasar, dibuktikan bahwa masih ada yang berbelanja walaupun jarak antara rumah dengan pasar di atas 5 km.

5. Kesimpulan

Hubungan antara potensi sumberdaya dan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi di Kabupaten Sukoharjo. Ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi (r_s), yaitu 0.593 yang berarti keduanya berhubungan erat dan positif. Terdapat hubungan timbal balik antara aksesibilitas dan ekonomi. Keduanya berkorelasi positif dan erat, kecuali Kecamatan Bulu yang mempunyai hubungan cukup erat, hal ini disebabkan mayoritas penduduk kecamatan Bulu lebih suka melakukan aktifitas perekonomian di luar kecamatan bulu. Aksesibilitas berhubungan positif dan bisa dikatakan mempunyai hubungan yang erat terhadap perekonomian suatu wilayah, jika aksesibilitas lancar maka perekonomian lebih maju. Adanya hubungan timbal balik antara besarnya aktifitas pasar dengan aktifitas perekonomian masyarakat di suatu wilayah, jumlah penduduk, layanan dan luas wilayah layanannya. Aktifitas pasar akan lebih besar pada wilayah yang kondisi sosial ekonominya lebih baik dan sebaliknya

Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong penyelesaian penelitian ini.

Referensi

- Arry Herlina. (1998). Fungsi Kota Kecamatan Dalam Pembangunan Wilayah Pedesaan (Studi Kasus Kabupaten DT II Purwakarta, Propinsi DT I Jawa Barat). *Scientific Respository*, <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/15673>.
- Arsyad, L. (2015). Ekonomi Pembangunan Lanjutan. In *Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan* (Vol. 05, Issue 01).
- Badan Perencanaan Daerah Sukoharjo. (2018). *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo*. Badan Perencanaan Daerah sukoharjo.
- Diartho, H. C., & Pratama, R. (2018). Analisis Fungsi Kecamatan sebagai Daerah Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri (Pendekatan Interaksi Geospasial). *MediaTrend*, 13(2), 188–198. <http://journal.trunojoyo.ac.id/mediatrend>
- Dumairy. (1994). *perekonomian indonesia*. erlangga.
- Endang Larasati. (2010). Identifikasi Fungsi Kecamatan dan Desa Dalam Menunjang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah DI Kabupaten Serang. *DIALOGUE*, 1(3).

- Fitria Dianawati. (2004). *Fungsi Ekonomi Kota Kecamatan Dalam Pembangunan Wilayah (Studi Kasus Kabupaten Semarang)*. IPB.
- Glasson, J., & Marshall, T. (2007). Regional planning. In *Regional Planning*. <https://doi.org/10.4324/9780203938935>
- Lestari, T. A., & Rijanta, R. R. R. (2018). Kajian Fungsi dan Peran Kota Wates Sebagai Pusat Pelayanan Sosial dan Ekonomi Terhadap Wilayah Hinterland. *Jurnal Bumi Indonesia*. <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/994>
- Prasetyo, N., & Pigawati, B. (2013). Evaluasi Kesesuaian Fungsi Pusat Kota Wonosobo Sebagai Pusat Pelayanan. In *Teknik PWK* (Vol. 2, Issue 3).
- puti Andiny. (2020). Analisis Perkembangan Ekonomi Wilayah sebagai Arah pembangunan Di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 4 no1.
- Soegijoko, B. T. S., & Kusbiantoro, B. S. (1997). Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Bandung: Yayasan Soegijanto Soegijoko*.
- Sumedi. (1997). *Fungsi Ekonomi Kota Kecamatan Dalam Pembangunan Wilayah (Studi Kasus Kabupaten Dati II Cilacap Provinsi Dati I Jawa Tengah)*.
- Walpole, R. E. (1982). *Pengantar Statistika Edisi Ke-3*. Gramadia Pustaka Utama.
- Dinas Pengelolaan Kekayaan Daerah, 2019, Laporan Tentang Pendataan Pedagang Pasar-pasar Se-Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, DPKD Kabupaten Sukoharjo, Sukoharjo
- Biro Pusat Statistik, 2018, Statistika Indonesia Tahun 2020. BPS